

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

OLEH

**AGOENG PRASETIA
1816041048**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

AGOENG PRASETIA

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota di Indonesia yang berkembang pesat, menghadapi tantangan dalam mengelola sampah yang terus meningkat. Kebijakan pengelolaan sampah yang telah diterapkan oleh pemerintah kota dinilai belum optimal. Fenomena yang menjadi permasalahan adalah proses implementasi kebijakan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung dan mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya sesuai kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Tempat penelitian yang digunakan adalah Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menggunakan model implementasi George Edward III meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Komitmen, Struktur Birokrasi, menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung belum optimal dalam mengatasi masalah sampah, tingkat pengelolaan sampah masih rendah dan masih banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik terutama masalah sampah rumah tangga. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung antara lain; kurangnya edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah, sumberdaya yang belum optimal dan kurang komitmen pemerintah. Namun ada faktor pendukung yang berkontribusi yaitu adanya kelompok pengelolaan sampah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Sampah Rumah Tangga

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

AGOENG PRASETIA

Bandar Lampung City, as one of the fastest-growing cities in Indonesia, faces challenges in managing waste that continues to increase. The waste management policy that has been implemented by the city government is not considered optimal. The phenomenon that becomes a problem is the process of implementing policies by the government to manage household waste, which is still low. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bandar Lampung City and identify the supporting factors and obstacles encountered in the implementation process according to the policies stipulated in Regional Regulation No. 5 of 2015. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and document analysis. The place of research used is the city of Bandar Lampung. The results of the study using the George Edward III implementation model include communication, resources, commitment, and bureaucratic structure, indicating that the waste management policy in Bandar Lampung City is not optimal in dealing with waste problems, the level of waste management is still low, and there is still a lot of waste that is not managed properly, especially the problem household waste. Some of the obstacles encountered in the implementation of waste management policies in the city of Bandar Lampung include a lack of education and socialization of waste management, resources that are not optimal, and a lack of government commitment. However, there are supporting factors that contribute, namely the existence of a waste management group

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Local Regulations, Household Waste

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**AGOENG PRASETIA
1816041048**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Agoeng Pras Setia**

No. Pokok Mahasiswa : **1816041048**


Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.
NIP 19710122 19951 2 2001


Dewie Brima Atika, S.IP, M.Si.
NIP 19821212 200801 2 017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meillyana, S.IP., M.A.
NIP 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.



Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Agoeng Pras Setia
NPM 1816041048

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 11-November-2000. Dibesarkan dalam keluarga sederhana dari Bapak Nurul Puadi S.E dan Ibu Mariah S.Pd dan merupakan anak keempat dari empat bersaudara atas nama Susi Damaiyanti Amd.Keb sebagai Anak Pertama, Achmad Alizar Amd.Kep (Alm) sebagai Anak kedua, dan Wido Wati Anneke Manupa S.Pd sebagai anak ketiga.

Tahun 2006, Penulis mengawali pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Kotabumi Udik diselesaikan pada tahun 2012, dilanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kotabumi diluluskan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMA Negeri 3 Kotabumi dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada didalam maupun diluar kampus. Mulai dari kegiatan organisasi mahasiswa, pengabdian dan penelitian ,serta kegiatan sosial lainnya. Dalam organisasi di kampus penulis pernah mengikuti dan aktif di beberapa organisasi yaitu di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM UNILA) sebagai Staff ahli di Kementerian Kajian dan Strategi pada tahun 2018, menjadi anggota bidang Sumber Daya Organisasi (SDO) di Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) pada tahun 2018-2020, serta menjadi Kepala Bidang Hubungan Luar HIMAGARA pada tahun 2020-2021.

MOTTO

“Kita Tidak Bisa Memutar Waktu Sehingga Semua Kejadian Terdapat Makna dan Tujuan Tersendiri”

(Penulis)

“Jangan Menjelaskan Dirimu Kepada Siapa Pun, Karena Yang Menyukaimu Tidak Butuh Itu. Dan Yang Membencimu Tidak Percaya Itu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Kesempurnaan Tidak Datang Dengan Sendirinya. Kesempurnaan Harus Diupayakan. Kesempurnaan Harus Dinilai. Proses Dan Hasil Pekerjaan Harus Diawasi”

(B.J.Habibie)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT, Aku persembahkan karya ini untuk :

KELUARGA BESAR AYAH DAN IBU KU TERCINTA

Bapak. NURUL PUADI S.E dan Ibu MARIAH S.Pd

Yang senantiasa memberikan do'a, semangat, dan dukungan

Terimakasih atas cinta, kerja keras, dan kesabaran yang telah diberikan untuk keberhasilan dan kesuksesan pendidikanku

PARA PENDIDIK DAN CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Terimakasih atas memberikan Bekal ilmu serta moral untuk melangkah lebih jauh di masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG" yang telah tersusun secara baik. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini belum tentu tersusun dengan baik seperti saat ini. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua ku tercinta, Bapak Nurul Pudi S.E dan Ibu Mariah S.Pd, Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik untuk anak-anakmu. Terimakasih, atas penguatan dan kasih sayang yang terus diberikan untukku disetiap harinya, serta untuk waktu, tenaga, biaya yang telah dikorbankan.
2. Ibu Dra.Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., MA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., MA selaku dosen pembimbing akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, saran nasehat, dan bimbingannya
7. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing pendamping penulis. Terima kasih atas segala ilmu, masukan, waktu, serta nasehat yang

diberikan kepada penulis untuk membantu menyelesaikan skripsi. Terlepas dari hal itu terimakasih atas segala kesempatannya telah diberikan banyak pengalaman dan ilmu yang ibu berikan.

8. Ibu Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji skripsi penulis. Terimakasih untuk semua kritik, dan saran yang diberikan untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi menjadi lebih baik
9. Seluruh tim pendidik dan kependidikan Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
10. Kepada Sahabat karib SMA ku Ridho, Ferdina, Yuda, Robi, Faizi, Tiwi, Selviana, dan teman-teman lainnya terimakasih sudah jadi support sistem terbaik.
11. Kepada Sahabat SKT 55, Saudara Dimas Adi Saputra, Saudara M. Nur Elviansyah, Saudara Zaid Hizbullah, dan Saudara Aldi Dharma Putra, terimakasih untuk semua kenangan semasa perkuliahan serta cerita-cerita yang sudah dilewati bersama.
12. Kepada sahabat-sahabat kampusku Gandhi, Krisdiyanto, Anggara, Chiesa, Albi, Aji, Fijay, Daniella, Ramvita, Nurlika, Salma, Dea, Susanti dan semua teman-teman andalusia yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas support system kalian, kenangan, pengalaman, hiburan dan segalanya selama di kampus.
13. Kepada sahabat Demisioner Kabinet Catra Byakta, Anggara, Dimas, Ramvita, Gandhi, Zanu, Kris, Fiola, Rido, Susan, Rosi, Rahma, Klarisa, Riki, Iqbal, Khozin, Dela, Terimakasih atas segala pengalaman yang luar biasa
14. Kepada sahabat KKN Sribasuki, Fachrezi, Kevin, Bambang, Yusuf, Nadila terimakasih atas kebersamaan 40 hari selama di Sribasuki, pengalaman yang mengasikkan
15. Terimakasih untuk mba abang HIMAGARA terkhusus Bang Ega, Bang Fatur, Mba Vira, Mba Uppa, Mba Sinta serta abang mba lainnya yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya selama perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

16. Kepada para deking GRANADA Septiya terimakasih atas segala bantuannya, dan kenangan untuk Anada, Faradipa, Amalia, Oliv, Dinda, Zahra, Atha, Egi, Alif, Hendra, Jimmy, Dandung dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semangat terus kalian untuk proses kuliahnya
17. Kepada Hafifah Damayanti terimakasih untuk segala dukungan, motivasi, serta semangat yang diberikan kepada penulis semasa penulisan skripsi ini dilakukan, sangat membantu untuk penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Kepada Seluruh pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung saya ucapkan terimakasih

Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023

Agoeng Prasetia

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENYETUJUI	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan	14
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	14
2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan	15
2.2.3 Model Implementasi Kebijakan	16
2.3 Tinjauan Tentang Sampah Rumah Tangga	25
2.4 Tinjauan Tentang Pengelolaan 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>)	26
2.5 Kerangka Pikir	28
BAB III. METODE PENELITIAN	32

3.1	Tipe dan Pendekatan Penelitian	32
3.2	Fokus Penelitian	32
3.3	Lokasi Penelitian	34
3.4	Jenis dan Sumber Data	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data	35
3.5.1	Wawancara	35
3.5.2	Observasi	36
3.5.3	Dokumentasi	38
3.6	Teknik Analisis Data	38
3.6.1	Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	39
3.6.2	Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	39
3.6.3	Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing</i>)	39
3.7	Teknik Keabsahan Data	40
3.7.1	Kredibilitas Data (<i>Credibility</i>)	40
3.7.2	Teknik Pengujian Keteralihan Data (<i>Transferability</i>)	41
3.7.3	Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (<i>Dependability</i>)	41
3.7.4	Teknik Kepastian Data (<i>Confirmability</i>)	42
BAB IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1	Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	43
4.1.2	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	46
4.1.3	Gambaran Umum Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Lampung ...	51
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	54
4.2.1.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung	55
a.	Komunikasi	60
b.	Sumberdaya	71
c.	Komitmen Pemerintah (Disposisi)	85
d.	Struktur Birokrasi	98
4.2.2.	Faktor pendukung dan kendala Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung	107
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	118
5.1	Kesimpulan	118

5.2	Saran.....	122
	DAFTAR PUSTAKA	123
	LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung.....	7
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3 Informan Terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.....	36
Tabel 4. Gambaran Objek Observasi Penelitian	37
Tabel 5 Dokumentasi	38
Tabel 6. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Volume Sampah Harian Kota Bandar Lampung	44
Tabel 7 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	50
Tabel 8. Matriks Faktor Komunikasi	69
Tabel 9. Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah	76
Tabel 10. Matriks Faktor Sumberdaya.....	83
Tabel 11. Matriks Faktor Komitmen Pemerintah (Disposisi).....	96
Tabel 12. Matriks Faktor Struktur Birokrasi.....	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Capaian Pengelolaan Sampah di Indonesia.....	4
Gambar 2 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah	5
Gambar 3 Sumber Sampah Kota Bandar Lampung	8
Gambar 4 Indikator-indikator proses implementasi Kebijakan	18
Gambar 5 Model implementasi Kebijakan Van Metter dan Van horn	23
Gambar 6 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 7 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	47
Gambar 8. Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga....	50
Gambar 9. Kantor Wahana lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung.....	52
Gambar 10 Kritik dan Saran WALHI	54
Gambar 11 Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah	57
Gambar 12. TPS3R dan Alat pencacah sampah	58
Gambar 13 Bentuk Kerjasama DLH dan WALHI.....	60
Gambar 14. Arus komunikasi kebijakan.....	62
Gambar 15 Kendaraan pengangkut sampah DLH terguling	77
Gambar 16 Pembaharuan fasilitas oleh DLH.....	78
Gambar 17. Audiensi Pengelolaan Sampah	94
Gambar 18. Struktur Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Bandar Lampung.....	99
Gambar 19. Kendaraan SOKLI menumpuk di TPS.....	104

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan cara awal pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam lingkup publik. Proses implementasi kebijakan publik diharapkan dapat menyelesaikan masalah publik sesuai dengan tujuan awal dari pembuatan kebijakan publik tersebut. Masalah lingkungan menjadi salah satu masalah publik yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini belum mampu diatasi secara tuntas oleh Pemerintah Indonesia. Masalah sampah harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dikarenakan pencemaran lingkungan terbesar terjadi karena manusia dan sampah menjadi faktor penyumbang pencemaran terbesar.

Masalah sampah saat ini menjadi perhatian bagi seluruh negara di dunia, hal ini dikarenakan sampah berpengaruh ke lingkungan hidup jika tidak dikelola dengan baik, termasuk menjadi perhatian bagi Negara-Negara di kawasan Asia Tenggara dan tentunya bagi Indonesia mengalami yang tidak lepas dari permasalahan sampah pula, negara di kawasan Asia Tenggara yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik adalah Singapura, dengan total penduduk sebanyak 5.638.700 pada tahun 2018 dan tentu saja menghasilkan sampah setiap hari.

Contoh pengelolaan sampah yang dilakukan Singapura membagi pengelolaan sampah dalam beberapa proses, pertama pengangkutan, di Singapura terutama pada bangunan-bangunan HDB atau *Housing & Development Board* (di negara kita biasa disebut dengan rumah susun), sudah memiliki desain standar. Pada masing-masing unit memiliki sebuah lubang pembuangan sampah yang bermuara pada

sebuah bak sampah dengan kapasitas cukup besar yang biasanya terletak di bawah masing-masing blok rumah. Kedua, Pengumpulan dan Pemilahan Sampah, sampah yang sudah diangkut dari beberapa area, kemudian akan dikumpulkan dan dilakukan pemilahan yang bertujuan untuk memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang misalnya sampah plastik, karet, kayu, kaleng, besi. Sedangkan sisa-sisa dapur, restoran, dan material lainnya merupakan material sampah yang tidak dapat didaur ulang.

Ketiga, Daur ulang dan Pembakaran, Singapura sangat mendorong proses daur ulang ini bahkan mereka membuat sebuah *Singapore Packaging Agreement*. Sebuah perjanjian terutama untuk perusahaan packaging dan makanan agar turut mendukung program daur ulang. Perusahaan-perusahaan tersebut harus menekan penggunaan material yang tidak dapat didaur ulang, serta mengutamakan penggunaan material yang dapat didaur ulang. Keempat, Pembuangan Akhir, abu sisa hasil pembakaran pada incinerator kemudian diangkut oleh truk menuju Tuas Marine Transfer Station dan selanjutnya dikirim ke Semakau Landfill dengan menggunakan kapal. Semakau Landfill merupakan tempat pembuangan akhir Singapura yang diresmikan penggunaannya pada bulan April tahun 1999. Keempat tahapan dan proses tersebut merupakan contoh pengelolaan sampah yang dilaksanakan Pemerintah Singapura secara sistematis dan terpadu.

Dengan luas negara serta jumlah penduduk yang sangat jauh berbeda antara Indonesia dan Singapura, namun Indonesia dapat menjadikan Singapura sebagai contoh pengelolaan sampah dengan sangat terkonsep, masyarakat serta pemerintah Singapura saling mendukung, hasil dari pengelolaan sampah di Singapura dijadikan sebagai energi terbarukan untuk penghasil listrik (Bona, 2019).

Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih banyak permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah secara cepat. Permasalahan pengelolaan sampah ini adalah permasalahan serius untuk ekosistem lingkungan, sampah rumah tangga,

limbah dari hasil produksi pabrik, dan bahan kimia lain yang tidak dipilah terlebih dahulu serta dibuang sembarangan ke sungai akan menimbulkan masalah lingkungan dan bencana, seperti banjir hingga nantinya akan merusak kondisi lingkungan, sampah yang berawal dari sungai akan berakhir ke lautan sehingga dapat mengganggu kehidupan biota laut dan mencemari lautan.

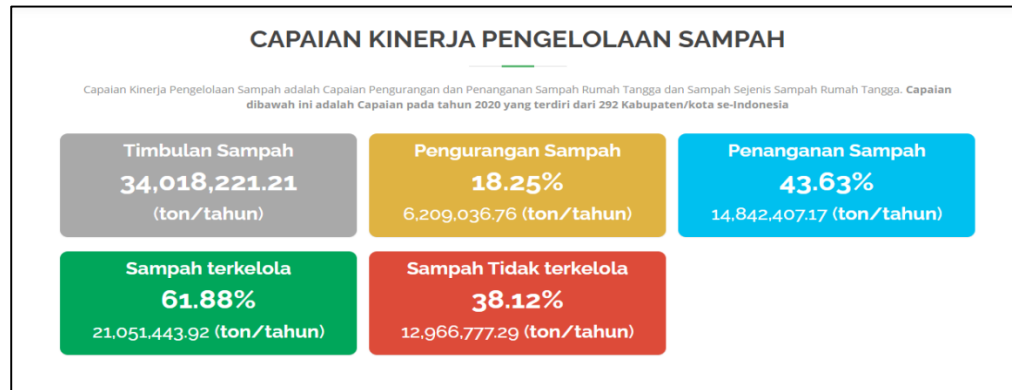
Pada tahun 2017 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan, Pemerintah mengeluarkan suatu rancangan strategi yang termuat dalam Peraturan Presiden No.97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Peraturan Presiden No.97 tahun 2017 adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah agar Indonesia dapat melakukan pengelolaan sampah 100 persen dengan target tercapai pada tahun 2025. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penerapan Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) yang termuat dalam Peraturan Presiden No.97 tahun 2017, saat ini sudah ada 21 Provinsi dan 353 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) (Peraturan Presiden No 97, 2017) .

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/18 Provinsi/Kabupaten/Kota harus menyusun Jakstrada dalam bentuk:

1. Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota.
2. Menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Menyusun program kebijakan dan strategi Provinsi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Keseriusan pemerintah ini berdasarkan pada jumlah total sampah yang dihasilkan per tahunnya di Indonesia sebesar 64 juta ton dan terus bertambah seiring penambahan jumlah penduduk, sampah-sampah tersebut berupa sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari 100 persen pengelolaan sampah yang direncanakan melalui Jakstrada dengan rincian persentase sebesar 30 persen

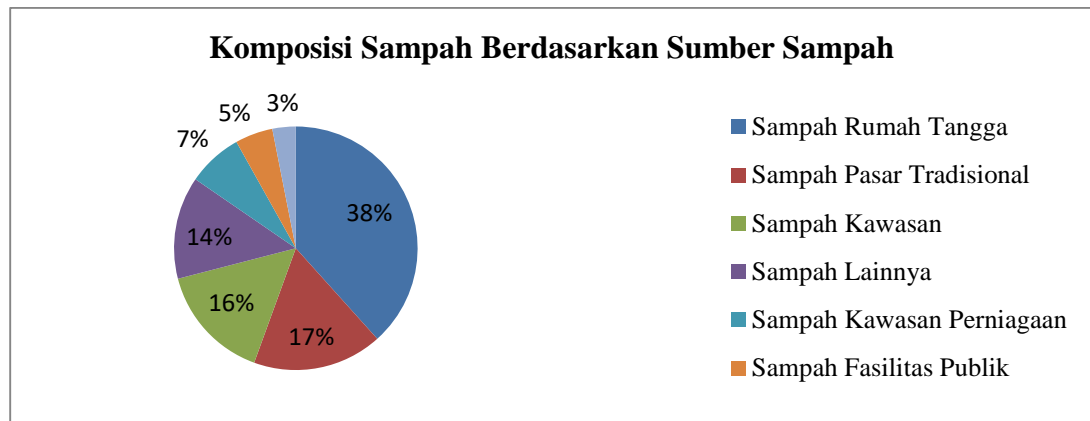
masuk ke target pengurangan (mencegah penumpukan sampah, daur ulang, pemanfaatan kembali), sementara 70 persen sampah pada 2025 masuk ke target penanganan (pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir.). Berikut capaian kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah selama 2020.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Gambar 1 Capaian Pengelolaan Sampah di Indonesia

Gambar tersebut menjelaskan capaian kinerja pemerintah selama tahun 2020 dalam melakukan pengelolaan sampah, capaian kinerja pengelolaan sampah adalah capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, capaian pada gambar diatas adalah capaian dari 292 kabupaten/kota se Indonesia. Capaian kinerja tersebut terdiri dari beberapa point yaitu, timbulan sampah atau volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per-tahun, pengurangan sampah, penanganan sampah, sampah terkelola, dan sampah tidak terkelola.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Gambar 2 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah

Untuk presentase total komposisi sampah berdasarkan sumber sampah yaitu, sampah rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar sebesar 2,769,6 juta atau 38,3% dari total sampah yang dihasilkan pertahun. Lalu selanjutnya sampah pasar tradisional sebesar 1,245,3 juta atau 17,2%, sampah kawasan sebesar 1,113,3 juta atau 15,4%, sampah lainnya sebesar 981,2 ribu atau 13,6%, sampah kawasan perniagaan sebesar 529,5 ribu atau 7,3%, sampah fasilitas publik 358 ribu atau 5%, dan sampah perkantoran sebesar 225,1 ribu atau 3,1%.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kendala terpenting dalam menangani permasalahan sampah. Contohnya tidak melakukan pemilahan sampah rumah tangga, membuang sampah di aliran sungai, dan tidak menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga masyarakat dapat berpartisipasi melalui bank sampah yang merupakan sumber daya murni masyarakat dalam rangka mengendalikan sampah plastik serta sampah rumah tangga lain mulai dari sumbernya, bank sampah memiliki organisasi yang di dalamnya gencar melakukan sosialisasi hingga pelatihan guna mewujudkan masyarakat berdaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Permana, 2019) Pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku yang

menghasilkan sampah. Kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah (Lesmana & Febriani, 2020). Pengelolaan sampah di masa yang akan datang harus berfokus pada mengubah cara pandang masyarakat serta perilaku masyarakat dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan sampah, karena sebagai penghasil sampah terbesar peran masyarakat sangat penting untuk mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah.

Pemerintah telah menetapkan mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 20 Ayat (1) menjelaskan Tentang Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R: *Reduce* (pengurangan sampah), *Reuse* (pembatasan timbunan sampah) dan *Recycle* (pendauran ulang sampah atau pemanfaatan kembali sampah). Pengelolaan sampah dengan konsep 3R bertujuan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat yang semula “membuang” sampah menjadi perilaku “mengelola” sampah (Agus et al 2019.)

Termasuk dalam 21 Provinsi yang telah menetapkan dokumen Jakstrada tentang pengelolaan sampah rumah tangga, Pemerintah Provinsi Lampung juga tidak lepas dari permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga, hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang tidak baik dan hanya dibuang begitu saja tanpa adanya pemilahan terlebih dahulu menjadikan sampah pada akhirnya akan menumpuk pada tempat pembuangan akhir. Merujuk data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, setiap keluarga rata-rata menghasilkan sampah sebanyak 0,45 kilogram/hari. Sementara, masih berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup 2020, timbunan sampah di Lampung mencapai 1.630.317,05 ton/tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Sampah Tertangani (Ton/Tahun)	Prosentase Tertangani (%)	Pengurangan (Ton/Tahun)	Prosentase Pengurangan (%)
Lampung Barat	294,636.00	44,585.04	3,999.47	8.97	668.3	1.50
Tanggamus	634,643.00	95,401.36	9,855.00	10.33	5,240.41	5.49
Lampung Selatan	1,259,289.00	229,820.24	33,093.33	14.40	13,789.21	6.00
Lampung Timur	1,105,225.00	201,703.56	26,280.00	13.03	12,102.21	6.00
Lampung Tengah	1,448,848.00	264,414.76	32,120.00	12.15	15,864.89	6.00
Lampung Utara	878,263.00	128,226.40	38,933.33	30.36	7,693.58	6.00
Way Kanan	472,483.00	65,715.91	48,718.00	74.13	3,099.45	4.72
Tulang Bawang	425,309.00	60,634.97	8,760.00	14.45	2,425.40	4.00
Pesawaran	542,984.00	79,275.66	10,706.67	13.51	3,963.78	5.00
Pringsewu	453,212.00	66,168.95	13,626.67	20.59	3,970.14	6.00
Mesuji	302,524.00	44,168.50	11,680.00	26.44	883.37	2.00
Tulang Bawang Barat	251,039.00	36,651.69	5,840.00	15.93	1,099.55	3.00
Pesisir Barat	153,743.00	22,446.48	8,760.00	39.03	336.7	1.50
Bandar Lampung	1,166,761.00	253,615.98	235,964.27	93.04	17,651.71	6.96
Metro	161,799.00	37,487.54	24,692.25	65.87	6,346.64	16.93
TOTAL	9,550,758.00	1,630,317.05	463,692.02	30.15	95,135.34	5.41

Sumber: Laporan Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Provinsi Lampung Tahun 2020. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

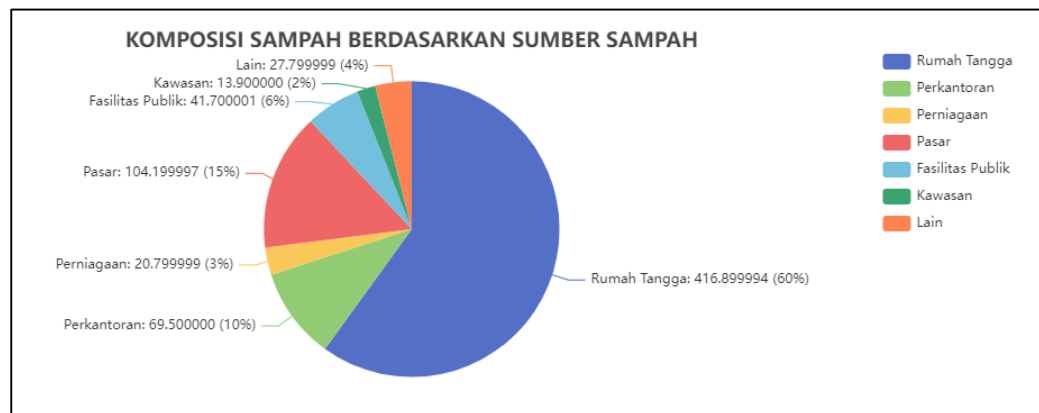
Pada tabel diatas menjelaskan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung Tahun 2020, terdiri dari beberapa poin yang dijelaskan, dapat dilihat untuk Kota Bandar Lampung dengan jumlah penduduk sebesar 1,1 juta jiwa dan total timbulan sampah sebesar 253,615.98 ribu ton/tahun, per tahun hanya berhasil melakukan pengurangan sampah sebesar 17,615.71 ribu ton/tahun, persentase sampah tertangani sebesar 235,964.27 ton/tahun, capaian tersebut tidak terlalu istimewa, jika dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Lampung sebesar 1,4 juta jiwa, total timbulan sampah sebesar 264,414.76 ton/tahun, dan pengurangan sampah sebesar 15,864.89 ton/tahun, dengan persentase sampah tertangani sebesar 32,120.00 ton/tahun. Tidak terlalu signifikan perbandingan antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah, hanya pada persentase sampah tertangani Kota Bandar Lampung jauh lebih baik.

Sebagai bentuk upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang baik. Pemerintah Provinsi Lampung harus dapat mengimplementasikan Kebijakan Strategi Nasional tersebut untuk diturunkan menjadi sebuah Kebijakan Strategi Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017, hal ini merupakan komitmen antara Pemerintah Pusat dan

Provinsi, serta bagaimana Pemerintah Provinsi dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut ke Kabupaten/Kota.

Dari penjelasan yang ada menjelaskan proses implementasi Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 di Provinsi Lampung, dengan berfokus melihat implementasi kebijakan tersebut di Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota dari Provinsi Lampung, untuk saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga masih menggunakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 dikarenakan Jakstrada Kota Bandar Lampung masih dalam tahap perumusan, dapat dilihat pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung belum cukup baik dimana pengurangan sampah per-tahunnya hanya sebesar 6% saja dari target Pemerintah Pusat dalam Jakstranas sebesar 30%.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, persentase sampah di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 berdasarkan sumber sampah sebagai berikut.



Sumber: Komposisi Sampah di Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Gambar 3 Sumber Sampah Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data tersebut, sumber sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga sebesar 416,90 ton atau 60% dari total keseluruhan sampah yang dihasilkan, dapat diartikan jika pengelolaan sampah rumah tangga tidak berjalan

dengan baik maka akan berdampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat, seperti rusaknya ekosistem lingkungan sekitar permukiman masyarakat jika sampah rumah tangga tidak dikelola dengan tepat dan dibuang sembarangan ke aliran sungai, atau ke selokan dan daerah resapan air.

Sebagai acuan untuk pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dapat melihat Kota Surabaya mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Pengetahuan masyarakat Kota Surabaya (tentang sampah secara umum, pemilahan sampah, dan 3R) termasuk tinggi (diatas rata-rata yaitu 6,50) namun penerapan pengelolaan sampah di Kota Surabaya (penerapan 3R, pemilahan sampah organik dan non organik serta pemilahan sampah medis dan non medis) tergolong rendah dan masih perlu di tingkatkan dengan mengacu kepada anjuran dan peraturan dari Pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Kota Surabaya yang berlaku (Juwono & Diyanah, 2021).

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung belum bisa dikatakan baik untuk saat ini dapat terlihat dari pengelolaan dan pengurangan sampah per-tahun 2020, pada tahun 2017-2018 melalui penilaian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kontes kota terbersih atau adipura Kota Bandar Lampung bersama Manado menjadi kota terkotor pada Adipura saat itu. Kebijakan-kebijakan yang telah disiapkan pemerintah fakta di lapangan menunjukkan belum semua berjalan dengan baik, seperti bank sampah yang diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk menanggulangi sampah rumah tangga serta sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Tetapi di Kota Bandar Lampung bank sampah kurang berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia dan biaya pengelolaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, contohnya pada bank sampah yang terletak di Lapangan Kalpataru Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling.

Suatu kebijakan memiliki tujuan yang baik, namun dalam proses pengimplementasiannya jika terjadi kegagalan maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Begitu juga dengan pengelolaan sampah rumah tangga walaupun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, namun jika tidak diimplementasikan dengan baik maka program ini tidak berhasil mencapai tujuannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis buat pada latar belakang, maka dari itu penulis mencoba untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung?.
2. Apa saja pendukung dan kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung?.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Analisis deskripsi implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung.
2. Teridentifikasinya faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang akan penulis lakukan, dengan cara menerapkan ilmu serta teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam melakukan pembahasan terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak-pihak lain pada umumnya yang berkaitan langsung pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama dari peneliti terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nurlina, Muhafidin, dan Sukarno 2021	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)	Bentuk implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di kabupaten Bandung masih kurang berhasil, hal tersebut terjadi dikarenakan, pelaksana, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih kurang, hal tersebut lah yang menjelaskan mengapa proses implementasi yang dilakukan Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung bersama masyarakat Kabupaten Bandung masih kurang berhasil.
Daeni dan Rizqi 2019	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang	Hasil dari penelitian ini berisikan proses-proses pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan point-point

		seperti pewadahan, pengangkutan, pemilahan, serta menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang yang belum berjalan dengan optimal.
Yudianto, Setyono, dan Handayani 2021	Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora	Proses implementasi pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dengan mekanisme pengelolaan sampah masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan pola kumpul angkut dan buang sehingga pengelolaan sampah yang dilakukan belum berjalan secara optimal

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021)

Tabel tersebut menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan fokus pada implementasi pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor.97 Tahun 2017, dan penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul.

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti tuliskan masih terdapat celah dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di masing-masing daerah seperti yang peneliti temukan pada penelitian terdahulu yang peneliti baca belum mengimplementasikan dasar hukum terbaru dalam pengelolaan sampah yaitu Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017. Maka dari itu peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan agar penelitian yang dilakukan peneliti dalam melihat implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 dapat lebih baik

dalam melihat proses implementasi kebijakan yang dilakukan untuk pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung.

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.

Salah satu tahapan dari sebuah proses kebijakan ialah proses dalam implementasi kebijakan tersebut, dapat dikatakan implementasi kebijakan sebagai sebuah jembatan antara proses perumusan kebijakan dengan penerapan kebijakan tersebut secara langsung. Implementasi kebijakan menjadi sebuah rangkaian penting setelah sebuah kebijakan diformulasikan, tanpa adanya suatu pelaksanaan, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan berakhir sia-sia, maka dari itu pelaksanaan kebijakan termasuk hal yang penting dalam sebuah pembahasan kebijakan publik (Etih Henriyani 2015). Jadi fungsi dari implementasi adalah untuk membentuk sebuah proses yang memungkinkan tujuan-tujuan maupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai hasil akhir atau outcome.

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Definisi mengenai kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda, sehingga pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang masing-masing penulisnya. Chandler dan Plano (1988) mengartikan kebijakan publik sebagai pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

David Easton (1969) menyatakan kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Robert Eyestone mengartikan kebijakan publik secara luas dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai democratic governance, dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik (Handoyo, 2012)

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Paul A. Sabatier & Daniel Mazmanian, 1980 dalam (Subianto 2020:21) menjelaskan bahwa, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi menyebutkan secara tegas tujuan maupun sasaran yang akan dicapai, serta berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi.

Van Meter dan Van Horn 1975 dalam (Abdal, 2015:152) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan”. Kemudian merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai : *“Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (pernyataan ini memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan).

Merille S. Grindlle 1980 dalam (Handoyo, 2012a) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya.

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan

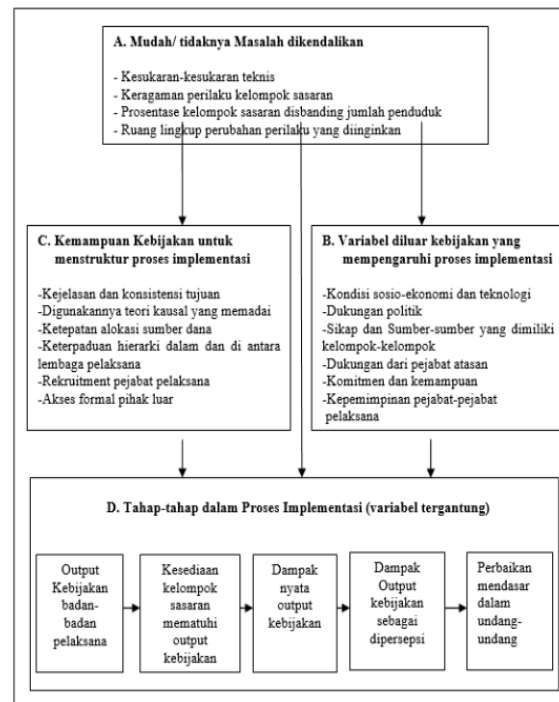
Dalam konteks kajian ilmu kebijakan negara atau analisis kebijakan negara banyak sekali model-model atau teori yang telah dikembangkan tentang model implementasi kebijakan, terdapat berbagai model implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan tujuan sebuah kebijakan atau program bukan hanya untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai tujuannya atau telah dilaksanakan. Tujuan dari model implementasi adalah menjadi sebuah panduan atau petunjuk yang harus ditinjau pelaksana atau stakeholders

kebijakan. Keberadaan berbagai model implementasi kebijakan atau program digunakan untuk melihat bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan sehingga memberikan gambaran pada sebuah pencapaian tujuan terutama mengenai hasil dan manfaatnya. Ada berbagai macam model implementasi kebijakan publik yang dijelaskan oleh berbagai ahli, antara lain sebagai berikut.

a) Model Implementasi oleh Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian

Kedua ahli ini mengemukakan bahwa hal yang menjadi unsur penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah dengan melakukan identifikasi Indikator yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Indikator-Indikator tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori/aspek, yaitu (Subianto 2020:54) :

- a.** Mudah tidaknya permasalahan dikendalikan
- b.** Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi
- c.** Pengaruh langsung pada Indikator politik terhadap keseimbangan dukungan terhadap tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan



Sumber: P. Sabatier & Mazmanian, 1980 dalam (Subianto 2020:55)

Gambar 4 Indikator-indikator proses implementasi Kebijakan

Pada gambar tersebut ketiga kategori Indikator tersebut, disebut sebagai Indikator bebas (*independent variable*), dan dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, disebut Indikator tergantung (*dependent variable*). Dalam hubungan antar Indikator tiap tahap akan berpengaruh terhadap tahap yang lain, misalnya tingkat kesediaan kelompok sasaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam keputusan-keputusan kebijakan dari badan-badan atau instansi pelaksana akan berpengaruh terhadap dampak nyata keputusan-keputusan tersebut:

Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian dalam (Abdal, 2015) menjelaskan pula terdapat tiga kelompok Indikator pula yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi yaitu:

- 1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya:
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- 2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
 - a. Kejelasan isi kebijakan;
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut;
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- 3) Indikator lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya :
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan pelaksana

b) Model Implementasi oleh Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Abdal 2015:174) proses Implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai Indikator. Dalam model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Terdapat beberapa Indikator yang saling berkaitan, antara lain:

1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (*utopis*), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2) Sumberdaya

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan sangat dipengaruhi dari bagaimana kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut

adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan

3) Karakteristik organisasi pelaksana

Menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan agen pelaksana yang meliputi organisasi formal maupun informal akan ikut terlibat dalam pengimplementasian kebijakan, hal ini dikarenakan kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh cirri yang tepat serta para agen pelaksananya. Van Meter dan Van Horn menjelaskan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, antara lain:

- a. Kompetensi dan ukuran Staff suatu badan
- b. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan pelaksana
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)
- d. Vitalitas suatu organisasi
- e. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu individu di luar organisasi
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

4) Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Van meter dan Van Horn mengemukakan menurut pandangan mereka kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, hal yang menjadi standar harus dipahami oleh para pelaksana yang

bertanggung jawab atas pencapaian standard dan tujuan kebijakan, maka dari itu standar dan tujuan dari kebijakan yang akan diimplementasikan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, dan demikian sebaliknya.

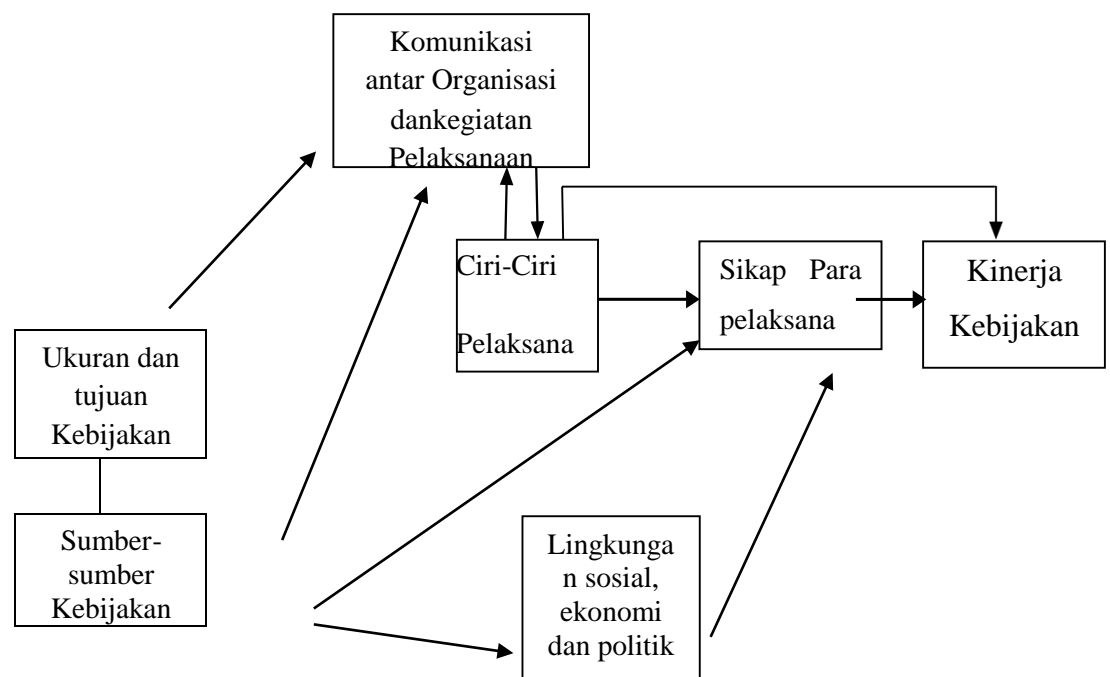
5) Disposisi atau sikap para pelaksana

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang memang merasakan permasalahan dan persoalan tersebut. Tetapi kebijakan publik yang saat ini biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui dan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain:

- a. Pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan
- b. Arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, dan rejection*)
- c. Intensitas terhadap kebijakan

6) Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik

Salah satu hal yang diperlukan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Upaya implementasi kebijakan mengharuskan kondisi eksternal yang kondusif.



Sumber: Van meter dan Van horn dalam (Subianto 2020:69)

Gambar 5 Model implementasi Kebijakan Van Metter dan Van horn

c) Model George Edward III

Model Implementasi Kebijakan George Edward III mengemukakan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan. Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Agar implementasi

kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan (Handoyo, 2012).

- 1) Komunikasi (*Communication*) berkaitan dengan kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumberdaya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.
- 2) Sumberdaya (*Resources*) berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, utamanya sumberdaya manusia dari sisi kuantitas serta kualitas, aspek sumberdaya yang penting dalam hal ini adalah keahlian pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
- 3) Komitmen (*Disposition*) berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
- 4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik, dalam hal ini yang perlu dijaga agar dalam implementasinya tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena struktur demikian akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik.

Dari penjelasan diatas terkait model-model implementasi kebijakan , penulis memilih model George Edward III sebagai fokus penelitian dikarenakan model ini sesuai dengan fokus dari penelitian ini “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung”. Penelitian menurut model George Edward III memiliki 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Komitmen, Struktur Birokrasi. Penulis memilih model ini karena penelitian ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipaparkan oleh George Edward III.

2.3 Tinjauan Tentang Sampah Rumah Tangga

Berbagai upaya dilakukan untuk mengelola sampah rumah tangga, karena dengan mengelola sampah rumah tangga dari awal sampah itu berasal dapat mengurangi jumlah timbunan sampah, biaya transportasi pengangkutan sampah dapat ditekan, dan pada akhirnya secara jangka panjang dapat memperpanjang umur lokasi TPA (Rosmala et al., 2020).

Menurut asalnya sampah dibagi dalam :

1. Sampah buangan rumah tangga; termasuk sampah biasa, bahan makanan, sampah sisa makanan, pembungkus makanan dan pembungkus perabotan rumah tangga, sampah sisa tumbuhan kebim dan sebagainya.
2. Sampah buangan pasar dan tempat-tempat umum (warung, toko dan sebagainya) termasuk sisa makanan, sampah pembungkus makanan dan pembungkus lainnya, sampah taman dan sebagainya
3. Sampah jalanan; termasuk diantaranya sampah debu jalanan, sampah sisa tumbuhan taman, sampah pembungkus bahan makanan dan bahan lainnya, sampah sisa makanan, sampah berupa kotoran serta bangkai hewan.
4. Sampah industri termasuk diantaranya air limbah industri, debu industri, sisa bahan baku dan bahan jadi dan sebagainya.

Sampah menurut jenisnya dibagi dalam:

1. Sampah organik adalah sampah termasuk diantaranya sisa bahan makanan serta sisa makanan, sisa pembungkus dan sebagainya. Keseluruhan dikenal sebagai sampah pasar serta sampah industri bahan makanan.
2. Sampah anorganik adalah sampah termasuk di antaranya berbagai jenis sisa gelas, logam, plastik dan sebagainya. Biasanya jenis ini terbagi atas

sampah yang dapat dihancurkan dan yang tak dapat dihancurkan oleh mikroorganisme termasuk sampah anorganik, misalnya sisa-sisa mobil bekas, gelas, dan sebagainya.

Termasuk darimana sampah itu berasal, sampah rumah tangga adalah salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah agar tidak jadi timbulan sampah yang menumpuk. Dalam kegiatan mengolah sampah dengan konsep 3R sampah rumah tangga dapat dijadikan sarana pembuatan kerajinan tangan sebagai sebuah proses pengelolaan sampah rumah tangga agar sampah yang telah dilakukan pengelolaan yang baik dapat bernilai kembali.

2.4 Tinjauan Tentang Pengelolaan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*)

Pengelolaan merupakan suatu upaya untuk mencegah serta tahap awal untuk melakukan penanganan terhadap sebuah permasalahan, dalam hal ini pengelolaan sampah dilakukan untuk menekan penumpukan sampah serta menekan dampak negatif yang mungkin terjadi dari sampah serta memikirkan bagaimana pemanfaatannya. Pengelolaan sampah secara umum bertujuan untuk menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik dengan pendekatan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan kembali agar dapat digunakan untuk menghilangkan kesan bahwa sampah tidak lagi berguna.

Ada beberapa poin-poin penting dalam pengelolaan sampah serta rangkaian untuk pembuangan sampah yang ideal sebagai berikut:

1. Pemilahan

Pemilahan ini dimulai dari sumber dihasilkannya sampah yang terdiri dari sampah organik dan anorganik, pemilahan sampah yang mewakili sumber energi tinggi dan pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai kegunaan yang tinggi.

2. Pewadahan

Kegiatan pewadahan secara individual harus disediakan di tingkat rumah dengan menyediakan 2 unit penampung sampah yang memisahkan antara sampah organik dan anorganik, pewadahan komunal (Kontainer dan TPS) khusus untuk menampung berbagai jenis sampah baik organik maupun anorganik seperti untuk sampah plastik, gelas, pakaian/tekstil, logam, sampah besar, sampah B3.

3. Pengumpulan

Meliputi waktu pengumpulan secara rumah ke rumah setiap 1 sampai 2 hari dan pengumpulan sampah dari TPS 1 kali seminggu.

4. Pengangkutan sampah

Kegiatan pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan compactor truck berbeda untuk setiap jenis sampah

5. Daur ulang

Merupakan kegiatan pemanfaatan kembali berbagai jenis sampah seperti kertas, plastik, peralatan elektronik bekas, serta kaca, dan limbah organik seperti daun, masing-masing jenis sampah tersebut dapat dilakukan proses daur ulang agar dapat bermanfaat kembali.

6. Kompos

Kegiatan pengomposan memerlukan sarana percontohan, penyuluhan, pelatihan dan pembinaan pengomposan ini dapat dilakukan dalam skala lingkungan yang dikelola oleh masyarakat sekitar, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sampah rumah tangga harus dikelola di sumbernya

Salah satu dasar pengelolaan sampah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang menjelaskan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008.) dan saat ini pemerintah berfokus dalam pengimplementasian

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, untuk daerah Kota Bandar Lampung terdapat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah sebagai dasar pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Menjadi perhatian pemerintah salah satu strategi pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dilakukan dengan konsep 3R yaitu *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*. *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.. *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat (Dermawan, Lahming,S. Mandra 2018).

Penerapan konsep 3R ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kondisi yang ada saat ini Pemerintah daerah, yang ditugaskan mengelola sampah, secara umum belum efektif menyelesaikan masalah sampah rumah tangga. Anggaran, sumber daya manusia (SDM), fasilitas pengelolaan sampah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sebanding dengan besarnya volume sampah, sehingga hanya sebagian saja sampah yang berhasil dikelola sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, masih banyak sampah yang dibuang sembarangan, sekalipun sudah disediakan berbagai TPS, TPA, serta sarana prasarana pendukungnya(Marlina, 2020).

2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025, hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di seluruh Provinsi maupun Kabupaten/Kota, kebijakan pengelolaan sampah ini

merupakan kebijakan ataupun program yang diselenggarakan secara terstruktur oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan pengelolaan sampah secara maksimal serta menanggulangi permasalahan yang timbul oleh timbulan sampah.

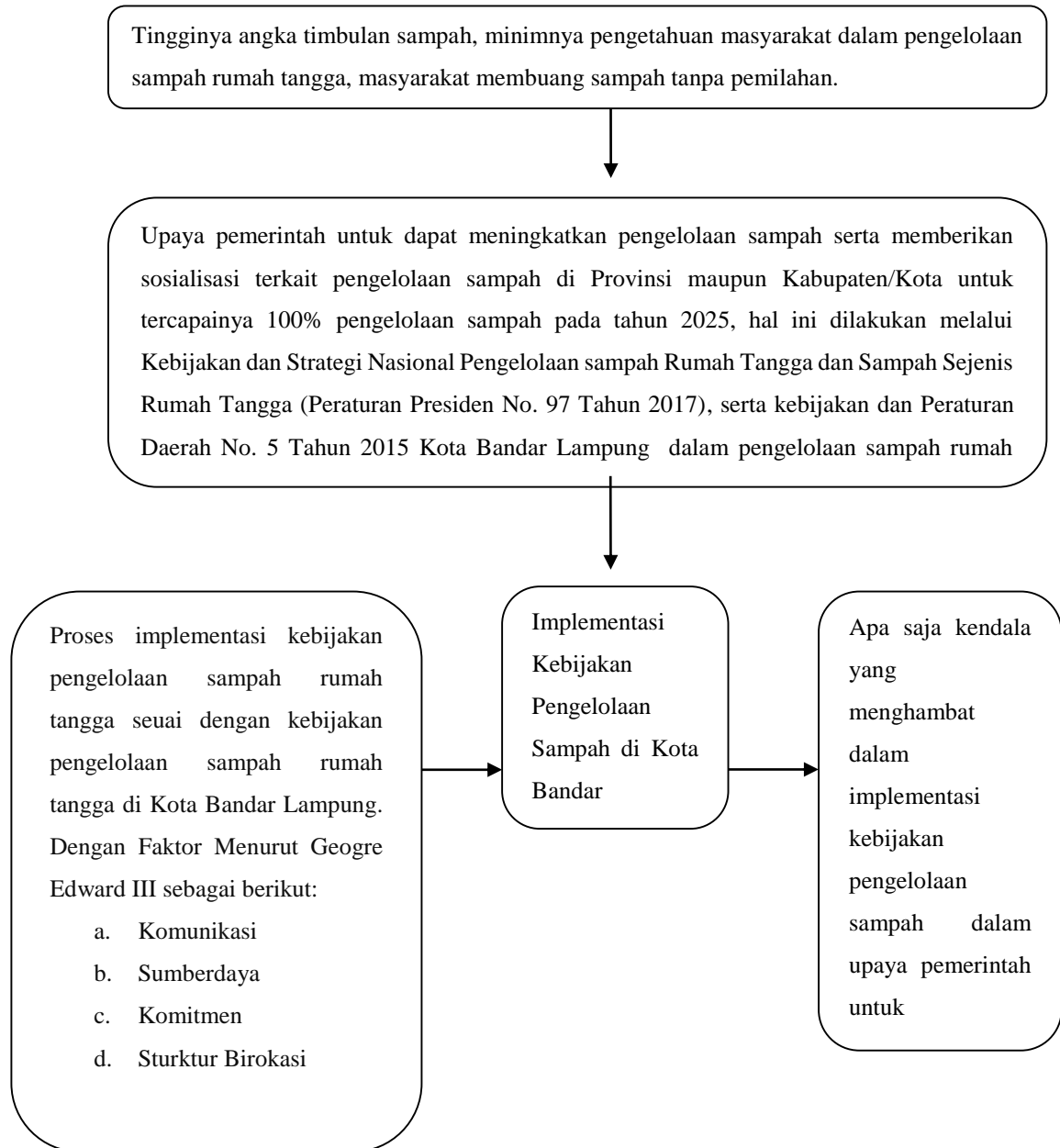
Penerapan kebijakan pengelolaan sampah ini memerlukan dukungan langsung oleh masyarakat, merujuk data dari Kementerian Lingkungan Hidup jumlah sampah harian yang dihasilkan oleh masyarakat selama satu tahun sebanyak 67,8 juta ton dan terus bertambah setiap tahunnya mengikuti pertambahan jumlah penduduk. Maka dari itu pemerintah memerlukan antusiasme serta dukungan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dari tingkat awal yaitu rumah hingga nantinya sampah tersebut sampai ke TPA dengan keadaan sudah terpilah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan salah satunya adalah pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) yang bila diterapkan di setiap rumah akan sangat berdampak dalam menanggulangi permasalahan timbulan sampah yang ada, serta banyak sekali inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat menjadi sebuah optimisme tersendiri dalam mengatasi permasalahan ini.

Pelaksanaan implementasi kebijakan ini dilaksanakan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pelaksanaan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai pelaksana kebijakan serta pengawas pada tingkat provinsi, pengawasan dilakukan untuk seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, salah satu daerah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan kebijakan ini di Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung, untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung terjalin koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun Kota, menjadi perhatian khusus baik dari Pemerintah Provinsi atau Kota dikarenakan dari data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung jumlah

timbulan sampah di Provinsi Lampung sebesar 1.630.317,05 ton/tahun, dan untuk Kota Bandar Lampung sebesar 253,615,98 ton/tahun untuk jumlah pengurangan timbulan sampah di Kota Bandar Lampung sebesar 17,651,71 ton/tahun atau hanya 6,96% pertahunnya.

Atas dasar permasalahan tersebut penelitian ini mengacu pada bagaimana proses pengimplementasian dari kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Bandar Lampung, pada penelitian ini, untuk mengetahui proses implementasi kebijakan menggunakan Indikator-indikator yang berasal dari beberapa model implementasi kebijakan yang dijadikan sebuah acuan serta batas-batas dalam proses implementasi kebijakan, Indikator tersebut dijadikan sebuah gambaran umum untuk melihat proses implementasi kebijakan, hal ini dilakukan agar peneliti masih memiliki panduan serta tidak terpaku pada satu model implementasi kebijakan publik saja.

Adapun kerangka berpikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Gambar 6 Kerangka Pikir

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dilakukan dengan mengumpulkan data secara lengkap. Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam riset ini kelengkapan serta kedalaman data yang diteliti merupakan suatu hal yang sangat penting. Mengenai proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung

Penulis memilih menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu penjelasan yang mendalam berkaitan dengan ucapan, tulisan serta tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu kontak setting tertentu yang dikaji dalam sebuah sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Hal ini untuk mendapatkan hasil yang baik maka penulis harus mengumpulkan data dan fakta yang terjadi atas fenomena yang akan peneliti teliti dari berbagai sumber lalu melihatnya dengan teori yang sudah ada dan bisa mendapatkan hasil yang komprehensif.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) (Sugiyono 2012:208), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian karena untuk memberikan batasan penelitian

yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Sebagai panduan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan memiliki beberapa Indikator-Indikator yang berasal dari beberapa model implementasi kebijakan yang dijadikan sebuah acuan serta batas-batas dalam proses implementasi kebijakan, Indikator tersebut dijadikan sebuah gambaran umum untuk melihat proses implementasi kebijakan, hal ini dilakukan agar peneliti masih memiliki panduan serta tidak terpaku pada satu model implementasi kebijakan publik saja.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah

1. Aktivitas penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga setelah kebijakan disahkan di Kota Bandar Lampung
2. Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung. Dengan Indikator sebagai berikut:

- a. Komunikasi

Komunikasi pada penelitian ini meliputi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung secara internal di dalam Dinas serta secara eksternal kepada NGO yaitu WALHI dan Masyarakat yaitu ketua PKH Sukarame dan Pendiri bank sampah lestari sejahterah

- b. Sumberdaya

Dalam penelitian ini sumberdaya manusia meliputi kualitas dan kuantitas pekerja dari dinas lingkungan hidup, dan sumberdaya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah rumah tangga dan anggaran menjadi fokus utama yang ingin peneliti teliti.

c. Komitmen

Dalam hal ini berkaitan dengan komitmen pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk komitmen.

d. Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan fragmentasi atau pembagian tugas pada struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta melihat SOP dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

3. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Kota Bandar Lampung sebagai pusat kota sekaligus pemerintahan di Provinsi Lampung merupakan kota dengan mobilitas penduduk yang tinggi, hal ini menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota yang menghasilkan sampah terbanyak di Provinsi Lampung, selain itu alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena Kota Bandar Lampung adalah salah satu Kota yang masih berproses dalam mengatasi permasalahan sampah dan pengelolaan sampah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Ditinjau dari jenis penelitian, maka pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari penelitian langsung kepada objek dengan teknik catatan ilmiah, wawancara langsung, serta dokumentasi resmi lainnya. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain:

1. Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data dalam hal ini peneliti dari objek penelitiannya. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti dapat menggunakan hasil dari wawancara dan observasi
2. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian yaitu dokumentasi

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Dimana berupa pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan pernyataan. Dalam proses pelaksanaannya penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui

3.5.1 Wawancara

Menurut (Sugiyono 2012:231) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih. Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Terkait penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa informan yang berkaitan langsung terhadap fokus penelitian.

Tabel 3 Informan Terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

No	Nama Informan	Institusi	Informasi
1.	Ismet Saleh, S.H	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Kebijakan dan aturan hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung
2.	Romi Pirial Arlan	Staff Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Pembahasan mengenai Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung
3.	Edi Santoso	Manajer Advokasidan Kampanye WALHI Lampung	Peran NGO dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kota Bandar Lampung
4.	Riskha Tri Budiarti	Ketua pendamping PKH masyarakat Sukarame/Founder Bank Sampah Lestari sejahterah Lampung	Peran Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022)

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Adapun objek yang diamati peneliti adalah proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung.

Observasi pada penelitian dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan terkait proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga, pengamatan yang dilakukan peneliti dengan melihat proses komunikasi yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Bandar Lampung bersama NGO serta masyarakat, kemudian melihat sumber daya manusia yang disediakan oleh DLH dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga, serta kualitas sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan sampah, dan melihat kondisi sumberdaya fasilitas penunjang pengelolaan sampah yang saat ini telah tersedia, kemudian melihat bentuk komitmen pemerintah kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga, dan melihat SOP pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat.

Tabel 4. Gambaran Objek Observasi Penelitian

No	Objek Yang Diamati	Informasi yang dicari
1	Komunikasi	Menjelaskan bagaimana laju komunikasi secara internal didalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta komunikasi yang dibangun oleh Dinas secara eksternal
2	Sumberdaya	Untuk mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang ada di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta kondisi sumber daya fasilitas penunjang pengelolaan sampah rumah tangga dan anggaran
3	Komitmen Pemerintah	Mencari bagaimana bentuk serta proses penerapan komitmen yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga,
4	Struktur Birokrasi	Mendapati pembagian tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta SOP dalam pengelolaan sampah rumah tangga

Sumber: Diolah peneliti 2022

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan penelitian. Studi ini merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, data-data yang dapat dijadikan informasi yaitu data-data dan dokumen-dokumen tertulis yang ada kaitanya dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai pengawas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana, berikut rincian dokumen apa saja yang digunakan pada penelitian ini :

Tabel 5 Dokumentasi

No	Dokumen	Substansi
1.	Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2.	Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3.	Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015	Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung
4.	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 2021-2026	Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar dalam pengelolaan sampah

(Sumber: Diolah oleh peneliti,2021)

3.6 Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono 2012:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono 2012:247). Data yang diperoleh peneliti di lapangan kemudian dipilih melalui reduksi data sehingga didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian atau tidak. Dalam penelitian ini proses reduksi data dilakukan dengan memilah serta menyeleksi data yang dibutuhkan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung dan mana yang tidak dibutuhkan. Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono 2012:249) menyatakan dalam melakukan penyajian data selain dengan teks yang naratif dapat menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja, dan chart. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dengan mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan yang kemudian didukung dengan dokumen-dokumen, table, dan foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pengambilan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dan yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono 2012:252). Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono 2012:268). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi.

3.7.1 Kredibilitas Data (*Credibility*)

Uji kredibilitas data menunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Untuk menguji kredibilitas, peneliti melakukan Triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh secara meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Terdapat 3 macam triangulasi dalam menentukan keabsahan data yaitu: (1) Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, (2) Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi atau kuesioner; (3) Triangulasi waktu, dalam melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti memutuskan untuk menggunakan salah satu saja dari ketiga macam triangulasi yaitu menggunakan triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Teknik yang sama berarti mengajukan pertanyaan yang sama ketika melakukan wawancara terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga kepada para informan seperti Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta Staff bidang pengelolaan sampah dan LB3, NGO Walhi Lampung, dan Masyarakat yaitu Ketua PKH Sukarame dan Pendiri Bank Sampah Lestari Sejahterah, yang berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.

3.7.2 Teknik Pengujian Keteralihan Data (*Transferability*)

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain (Sugiyono 2012:276). *Transferability* akan tercapai apabila pembaca memperoleh gambaran yang semakin jelas. Maka dari itu penelitian ini akan menyajikan laporan yang sedemikian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3.7.3 Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data (Sugiyono 2012:277). Penelitian seperti ini perlu diuji *dependability* dan

untuk mengecek apakah hasil penelitian yang dilakukan peneliti benar atau tidak maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

3.7.4 Teknik Kepastian Data (*Confirmability*)

Teknik pengujian kepastian data (*confirmability*) dilakukan untuk mengetahui proses penelitian, sehingga tidak memunculkan penelitian yang hanya ada hasilnya tetapi tidak ada proses penelitian. Dalam pengujian kepastian data sama halnya dengan uji kebergantungan sehingga prosesnya dilakukan melalui pengujian hasil penelitian oleh dosen pembimbing serta dosen pembahas. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung telah melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung, upaya tersebut dengan melakukan, pertama sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga kepada masyarakat, untuk saat ini sosialisasi yang dilakukan belum masif ke masyarakat, kedua membangun sarana penunjang pengelolaan sampah rumah tangga seperti TPS3R, serta mengembangkan program bank sampah, meskipun belum terlalu merata dengan beberapa kecamatan saja yang memiliki TPS3R, ketiga melakukan kerjasama dengan NGO, kerjasama yang dilakukan seperti membuat kajian kebijakan terkait pengelolaan sampah rumah tangga, selain itu dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga DLH dapat segera menerapkan keterbaharuan dasar kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dalam bentuk Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), membuat kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat dengan melibatkan RT/RW, serta memberikan fasilitas penunjang yang merata ke setiap Kecamatan, dan lebih meningkatkan laju informasi ke

masyarakat melalui sosialisasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga.

2. Faktor Pendukung dan Kendala Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung

Pada penelitian ini peneliti mendapati beberapa faktor pendukung dalam proses pelaksanaan Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung, terdapat satu faktor pendukung yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

a) Adanya kelompok pengelolaan sampah

Adanya kelompok pengelolaan sampah rumah tangga yang peduli terhadap lingkungan merupakan faktor yang dapat mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. Pionir ini menjadi pemantik dan peduli terhadap lingkungan akan, beberapa pionir ini tertarik untuk ikut serta dalam program-program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, serta lebih disiplin dalam melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, beberapa kelompok pendorong pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung melakukan inisiasi pembentukan bank sampah secara mandiri oleh masyarakat, dapat diambil contoh bank sampah lestari sejahterah serta bank sampah emak.id.

b) Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama pihak swasta

Dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung Pemerintah melakukan kerjasama yang melibatkan PT. Wijaya Karya (WIKA) untuk melakukan pengelolaan sampah yang ada di TPA Bakung dan TPS yang ada di Kota Bandar Lampung, kerjasama bertujuan untuk pengolahan sampah yang nantinya akan didaur ulang menjadi briket, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menjalin kerjasama

pula dengan komunitas yang bergerak dalam pengelolaan sampah rumah tangga, karena ada beberapa komunitas yang menjanjikan dan dapat diberdayakan lebih bila mendapat Perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung

Terdapat tiga kendala dalam proses Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung sehingga untuk saat ini proses kebijakan tersebut belum berjalan maksimal, ketiga kendala tersebut sebagai berikut:

- a) Kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah
Pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh DLH belum masif ke masyarakat terkait pengelolaan sampah, hal ini berpengaruh terhadap informasi untuk masyarakat yang bertujuan memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga, untuk saat ini masih banyak masyarakat kota Bandar Lampung yang belum mengetahui bagaimana melakukan pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga, sehingga hanya membuang sampah begitu saja ke TPS tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu.
- b) Sumberdaya yang belum optimal
Belum optimalnya aspek sumberdaya yang ada pada DLH Kota Bandar Lampung dari sisi kualitas dan kuantitas dapat dilihat dengan belum terdapatnya sumber daya manusia berupa tenaga ahli yang ada di TPS maupun TPS3R di Kota Bandar Lampung untuk memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga ke masyarakat. Serta pemerataan sumberdaya fasilitas penunjang dan anggaran dalam pengelolaan sampah rumah tangga menjadi satu kendala selain sumber daya manusia.

c) Kurangnya komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemerintah dalam hal ini DLH selaku pelaksana dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung, dapat melakukan keterbaharuan peraturan yang mengatur terkait pengelolaan sampah rumah tangga melalui Kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) kedalam Peraturan daerah, dengan adanya keterbaharuan peraturan tersebut pemerintah dapat melibatkan pengelolaan sampah rumah tangga hingga ke tingkat Kecamatan serta RT/RW yang diharuskan terlibat dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga, dan belum diberlakukan sanksi bagi masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah rumah tangga, dan belum terdapat SOP pengelolaan sampah bagi masyarakat menjadi hal lain yang menunjukkan minimnya komitmen pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat segera menerapkan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam Peraturan Daerah, untuk terciptanya keterbaharuan peraturan dan landasan hukum sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) pengelolaan sampah rumah tangga.
- b. Pembuatan kegiatan pengelolaan sampah secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari tingkat Kecamatan hingga RT/RW dalam pengelolaan sampah rumah tangga,
- c. Pemerataan fasilitas penunjang serta tenaga ahli dalam pengelolaan sampah rumah tangga di tiap-tiap Kecamatan Kota Bandar Lampung.
- d. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat melakukan kerjasama dengan komunitas pengelolaan sampah rumah tangga yang ada, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat agar mulai melakukan pengelolaan sampah rumah tangga.
- e. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung aktif melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial untuk meningkatkan laju informasi pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat dan informasi terkait perusahaan atau komunitas yang menerima hasil pengelolaan sampah rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, A. (2015). *Kebijakan publik: Memahami konsep kebijakan publik* (Absal (ed.); 1st ed., Vol. 1). Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Agus, R. N., Oktaviyanthi, R., & Sholahudin, U. (2019). 3R: Suatu Alternatif Pengolahan Sampah Rumah Tangga. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 72. <https://doi.org/10.30656/ka.v1i2.1538>
- Anjani, A., Hidayah, A. N., Ariani, P., Sulastri, R., & ... (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah Di Kabupaten Purbalingga. *NECTAR: Jurnal ...*
- Daeni, M., & Rizqi, H. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang*, 3(3), 1–12.
- Dermawan, D., Lahming, L., & S. Mandra, M. A. (2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah. *UNM Environmental Journals*, 1(3), 86. <https://doi.org/10.26858/uej.v1i3.8074>
- Enri Damanhuri dan Tri Padmi. (2014). Pengelolaan Sampah Terpadu. *Pengolaan Sampah Terpadu*.
- Etih Henriyani. (2015). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 1).
- Fadilla, N., Safitri, D. P., & Kurnianingsih, F. (2019). *Implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. 1–15.
- Fangga, F., & Mulasari, S. A. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Domestik Di Kabupaten Bantul Propinsi D.I. Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2). <https://doi.org/10.47317/jkm.v9i2.8>
- Faridah Az Zahro, Ari Subowo, T. A. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BUTUH KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI. *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 1(1), 1–18.
- Fitri, S. E., & Ferza, R. (2020). Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 11–24. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.40>

- Handoyo, E. (2012b). Kebijakan Publik Eko Handoyo. *Kebijakan Publik*, 1, 315.
- Hardiyansyah, H., & Effendi, R. (2014). Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Palembang. In *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* (Vol. 30, Issue 1, p. 108). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.572>
- Hardiyanti, K. (2021). Evaluasi Kebijakan pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v11i2.8342>
- INDONESIA, U.-U. R., & 2002, N. 18 T. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Juwono, K. F., & Diyanah, K. C. (2021). Analisis pengelolaan sampah rumah tangga (sampah medis dan nonmedis) di kota Surabaya selama pandemi COVID-19 Analysis Household Waste Management (Medical and Non-Medical Waste) in Surabaya City during Covid-19 Pandemic. *Ekologi Kesehatan*, 20(1), 12–20.
- Lecesnawati, R., & Prabawati, I. (2017). Implementasi Program Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di RT 03 RW 03 Jombang Kota Surabaya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Lesmana, T. C., & Febriani, H. (2020). Pelatihan Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Rumah Tangga. *DIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <http://jurnal.stikeswirahusada.ac.id/dimas/article/view/293>
- Marleni, Y., Mersyah, R., & Brata, B. (2018). Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 1(1), 35–40. <https://doi.org/10.31186/naturalis.1.1.5915>
- Marlina, A. (2020). Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 11(2), 125–144. <https://doi.org/10.37640/jip.v11i2.127>
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12.
- Murasyid, H., & Irawanto, I. (2021). Implementasi Perda No 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Administraus*, 5(1), 94–110. <https://doi.org/10.56662/administraus.v5i1.126>
- Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 279. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>
- Nurchahyo, E., & Ernawati, E. (2019). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 31–37. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.1940>

- Peraturan Presiden No 97. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.* 1–15. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73225/perpres-no-97-tahun-2017>
- Permana, A. A. (2019). ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA SEMARANG. *Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 1(1), 13.
- Rahman, F., & Sentosa, A. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALANGKA RAYA: Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 In *Administraus*. ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id.
- Rosmala, A., Mirantika, D., & Rabbani, W. (2020). Takakura Sebagai Solusi Penanganan Sampah Organik Rumah Tangga. *Abdimas Galuh*, 2(2), 165. <https://doi.org/10.25157/ag.v2i2.4088>
- Saepudin, A., & Kushendar, D. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung (Studi Kasus Kangpisman Di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1302–1309. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i5.2021.1302-1309>
- Safitri, H. F. D., & Syahara, T. A. (2021). Model Komunikasi Top-Down dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Borobudur Communication Review*, 1(1). <https://doi.org/10.31603/bcrev.4902>
- Solihin, M., & Mulda, R. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2018. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 3(2). <https://doi.org/10.33373/jtp.v3i2.2073>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant*.
- Sugiyono, D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Supriyanto, D., Yusuf Effendi, M., Irfatur Rohmah, A., Salamah, D., Kholidah, D., Yuyik Ati Ningsih, H., Mafida, L., Husna, M., Al Baidowi, M. K., & Iis Siti Rahayu, Y. (2021). PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT MELALUI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH REDUCE, RE-USE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA PURWOJATI, KECAMATAN NGORO, KABUPATEN MOJOKERTO. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 2(2). <https://doi.org/10.35897/jurnalaksiafirmasi.v2i2.584>
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71–84.
- Yanti, D. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R*. repository.uir.ac.id.
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan

Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(1), 21–26. <https://doi.org/10.14710/JKLI.20.1.21-26>

Yulistia, G., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 1–11.